



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktifitas dan produksi pertanian dengan penerapan pemupukan berimbang dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pupuk berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenahan Tanah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, Dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Medan.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna Pink (Merah Muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat kelurahan/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
17. Produsen adalah Produsen pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik di dalam negeri.
18. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kijang, dan PT Pupuk Iskandar Muda;
19. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
20. Wilayah Tanggung Jawab adalah kota termasuk kecamatan dan/atau kelurahan yang menjadi tanggung jawab dari produsen, distributor, dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.

21. Lini-I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
22. Lini-II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk yang selanjutnya disingkat UPP atau di luar wilayah pelabuhan.
23. Lini-III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
24. Lini-IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
25. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
26. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
27. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
28. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
29. Penyuluh adalah petugas yang memberikan informasi/penyuluhan;
30. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota;

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kota jenis, jumlah, sektor, sub sektor, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut kecamatan jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan.
- (4) Rincian alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh.
- (6) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu, dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya Keputusan Walikota berdasarkan atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di satu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur, dan Peraturan Walikota.
 - c. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV bagi petani yang belum berkelompok dapat dilakukan dengan penunjukan identitas serta rekomendasi dari Dinas.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.450; per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 700; per kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) KPPP kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) KPPP kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

- (2) Walikota menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 19) Juncto Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 6 FEBRUARI 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 6 FEBRUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR

: 9 TAHUN 2012

TANGGAL

: 6 FEBRUARI 2012

TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.184	74	167	468	227
2	Peternakan	5	-	3	-	4
3	Perikanan	234	101	-	-	67
JUMLAH		1.403	175	170	468	298

WALIKOTA MEDAN,

ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MEDAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	MEDAN BELAWAN	70	27	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	337	47	40	100	49
3	MEDAN DELI	170.5	9	15	53	37
4	MEDAN SUNGGAL	31	7	6	25	16
5	MEDAN HELVETIA	29	6	6	32	15
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	204.5	25	25	93	41
9	MEDAN SELAYANG	164	7	32	58	40
10	MEDAN JOHOR	19	3	6	8	12
11	MEDAN AMPLAS	21	2	6	10	11
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	9	0	3	9	7
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	347	39	31	80	39
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1402	172	170	468	267

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

WALIKOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012

TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	SUB SEKTOR	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TANAMAN PANGAN	26	25	24	39	225	211	41	36	32	200	260	45	1164
2	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
3	PERIKANAN	28	22	17	13	17	14	17	16	18	22	24	26	234
	JUMLAH	54	47	41	52	242	225	58	53	51	223	285	72	1,403

B. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	SUB SEKTOR	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TANAMAN PANGAN	5	5	1	5	10	11	5	5	1	9	12	5	74
2	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PERIKANAN	12	10	7	6	7	6	7	7	8	10	10	11	101
	JUMLAH	17	15	8	11	17	17	12	12	9	19	22	16	175

C. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	SUB SEKTOR	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TANAMAN PANGAN	2	2	1	4	36	33	5	5	4	37	33	5	167
2	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
3	PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2	2	1	4	36	33	6	6	4	38	33	5	170

D. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	SUB SEKTOR	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TANAMAN PANGAN	26	10	15	10	69	63	10	19	44	67	74	61	468
2	PETERNAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	26	10	15	10	69	63	10	19	44	67	74	61	468

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	SUB SEKTOR	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TANAMAN PANGAN	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	227
2	PETERNAKAN	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4
3	PERIKANAN	8	6	5	4	5	4	5	4	5	6	7	8	67
	J U M L A H	11	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16	298

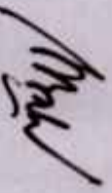
WALIKOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ir. SYAIFUL BAHRI



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MEDAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2012
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
 TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	8	6	6	5	6	4	5	5	6	7	6	6	70
2	MEDAN LABUHAN	12	9	8	10	70	48	12	11	11.5	55	75.5	15	337
3	MEDAN DELI	3	3	3	5	26	39	4	4.5	4	35.5	40	4.5	171.5
4	MEDAN SUNGGAL	2	1	2	1	4	5	1	2	2	3	5	3	31
5	MEDAN HELVETIA	2	1	2	2	4	4	0	1	1	4	5	3	29
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGGAN	6	7	6	8	32	32	10	9.5	7	28.5	49	10.5	205.5
9	MEDAN SELAYANG	4	5	4	6	28	37	5	5	3	26	35	6	164
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	2	2	2	3	2	2	3	3	0	19
11	MEDAN AMPLAS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	2	1	8
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	16	14	8	10	65	51	16	11	12.5	59	62.5	22	347
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	54	47	41	52	242	225	58	53	51	223	285	72	1.403

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	5	2	1	1	2	1	2	1	3	3	3	3	27
2	MEDAN LABUHAN	4	5	3	4	4	4	4	3	2	4	5	5	47
3	MEDAN DELI	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	9
4	MEDAN SUNGGAL	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	7
5	MEDAN HELVETIA	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	6
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	4	3	1	1	2	2	1	2	0	3	4	2	25
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	5	39
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	17	15	8	11	17	17	12	12	9	19	22	16	175

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	1	0	0	1	9	7	2	1.5	1	9.5	7	1	40
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	3	3	1.5	1	0	2.5	3	1	15
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	6
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	6
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	1	1	1	8	4	0	0	1	4	4	1	25
9	MEDAN SELAYANG	0	1	0	1	5	5	1	1	1	8	8	1	32
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	6
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	6
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	1	0	0	1	7	7	1.5	1.5	1	5	5	1	31
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2	2	1	4	36	33	6	6	4	38	33	5	170

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	6	3	4	3	11	10	3	5	12	13	15	15	100
3	MEDAN DELI	3	1	1	2	10	10	1	1	3	8	8	5	53
4	MEDAN SUNGGAL	1	1	0	1	4	5	0	1	2	5	5	0	25
5	MEDAN HELVETIA	1	1	0	1	8	7	0	2	2	5	5	0	32
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	5	1	4	1	11	10	3	4	12	12	15	15	93
9	MEDAN SELAYANG	5	1	3	1	10	7	1	1	6	7	8	8	58
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	3	1	8
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	3	0	10
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	9
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	5	2	3	1	10	9	1	4	7	10	12	16	80
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	26	10	15	10	69	63	10	19	44	67	74	61	468

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	MEDAN LABUHAN	3	1	2	8	8	2	3	1,5	9,5	3	4	14	59
3	MEDAN DELI	1	0	1	4,5	5	1,5	0	0	6	1	1	7	28
4	MEDAN SUNGGAL	0	1	0	2	2	1	0	1	2	1	1	2	13
5	MEDAN HELVETIA	0	1	0	2	2	1	0	0	2	1	1	1	11
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	3	1	2	6	7	1,5	3	0,5	9	3	3	14	53
9	MEDAN SELAYANG	0	0	1	6	7	1	2	0	8	2	1	9	37
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	6
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	5
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	2	3	2	7,5	8	3	3	1	9,5	3	3	12	57
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	11	9	10	41	44	14	13	7	52	16	16	64	297

WALIKOTA MEDAN,

ttd

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012

TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

A. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	6	4	5	8	67	46	9	8	8	52	70	10	293
3	MEDAN DELI	3	3	3	5	26	39	4	4	4	35	40	4	170
4	MEDAN SUNGGAL	2	1	2	1	4	5	1	2	2	3	5	3	31
5	MEDAN HELVETIA	2	1	2	2	4	4	0	1	1	4	5	3	29
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	4	5	4	6	30	30	8	7	5	26	47	8	180
9	MEDAN SELAYANG	4	5	4	6	28	37	5	5	3	26	35	6	164
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	2	2	2	3	2	2	3	3	0	19
11	MEDAN AMPLAS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	2	1	8
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	5	6	3	7	60	46	10	6	6	50	52	10	261
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	26	25	24	39	225	211	41	36	32	200	260	45	1.164

B. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	2	2	0	2	2	2	2	1	0	1	2	1	17
3	MEDAN DELI	1	1	0	1	2	1	0	1	0	1	1	0	9
4	MEDAN SUNGGAL	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	7
5	MEDAN HELVETIA	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	6
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	7
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	1	7
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	13
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	5	1	5	10	11	5	5	1	9	12	5	74

C. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	1	0	0	1	9	7	2	1	1	9	7	1	39
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	3	3	1	1	0	2	3	1	14
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	6
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	6
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	1	1	1	8	4	0	0	1	4	4	1	25
9	MEDAN SELAYANG	0	1	0	1	5	5	1	1	0	8	8	1	32
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	6
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	6
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	1	0	0	1	7	7	1	1	1	5	5	1	30
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2	2	1	4	36	33	5	5	4	37	33	5	167

D. ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	6	3	4	3	11	10	3	5	12	13	15	15	100
3	MEDAN DELI	3	1	1	2	10	10	1	1	3	8	8	5	53
4	MEDAN SUNGGAL	1	1	0	1	4	5	0	1	2	5	5	0	25
5	MEDAN HELVETIA	1	1	0	1	8	7	0	2	2	5	5	0	32
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	5	1	4	1	11	10	3	4	12	12	15	15	93
9	MEDAN SELAYANG	5	1	3	1	10	7	1	1	6	7	8	8	58
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	1	8
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	3	0	10
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	2	1	9
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	5	2	3	1	10	9	1	4	7	10	12	16	80
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	26	10	15	10	69	63	10	19	44	67	74	61	468

E. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	1	0	1	7	7	1	2	0	9	2	2	12	44
3	MEDAN DELI	1	0	1	4	5	1	0	0	6	1	1	7	27
4	MEDAN SUNGGAL	0	1	0	2	2	1	0	1	2	1	1	2	13
5	MEDAN HELVETIA	0	1	0	2	2	1	0	0	2	1	1	1	11
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	1	0	1	6	7	1	2	0	8	2	1	12	41
9	MEDAN SELAYANG	0	0	1	6	7	1	2	0	8	2	1	9	37
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	6
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	5
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	0	1	1	6	6	2	2	0	8	1	2	10	39
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	3	5	36	39	9	8	2	47	10	9	56	227

F. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	1
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	1,5
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	1,5
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	1
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5

G. ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	1
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0	1
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	1
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3

H. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	MEDAN LABUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	1
3	MEDAN DELI	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	1
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0	1
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	1
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	4

1. ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	8	6	6	5	6	4	5	5	6	7	6	6	70
2	MEDAN LABUHAN	6	5	3	2	3	2	3	3	3	3	5	5	43
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	11	8	5	3	5	5	6	5	6	9	10	12	85
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	28	22	17	13	17	14	17	16	18	22	24	26	234

J. ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	5	2	1	1	2	1	2	1	3	3	3	3	27
2	MEDAN LABUHAN	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	30
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	3	3	1	1	1	1	1	2	0	2	2	1	18
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	26
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	12	10	7	6	7	6	7	7	8	10	10	11	101

K. ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN.

NO.	KECAMATAN	BULAN												TOTAL (TON)
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	MEDAN BELAWAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
2	MEDAN LABUHAN	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	15
3	MEDAN DELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MEDAN SUNGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEDAN HELVETIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MEDAN DENAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MEDAN TEMBUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN TUNTUNGAN	2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	2	2	11
9	MEDAN SELAYANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	MEDAN JOHOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	MEDAN AMPLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MEDAN BARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	MEDAN POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	MEDAN MAIMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	MEDAN BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	MEDAN PETISAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	MEDAN KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEDAN AREA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MEDAN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	MEDAN MARELAN	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	17
21	MEDAN PERJUANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	8	6	5	4	5	4	5	4	5	6	7	8	67

WALIKOTA MEDAN,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAFUL BAHRI